

## **Analisis Efektivitas Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tebo Timur Unit X**

*(Analysis of the Effectiveness of the Tebo Timur Production Forest Management Unit  
(KPHP) Institution Unit X)*

**Haryani, Ahyauddin\***

*<sup>1</sup>Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, Jambi*

*\*Coressponding author: ahyauddin@unja.ac.id*

### **ABSTRACT**

*KPH is an organization that works at the site level and is expected to be a prerequisite for the implementation of a sustainable and just forest management system. The purpose of this study was to analyze the level of institutional effectiveness and determine the driving and inhibiting factors in the management of KPHP Tebo Timur Unit X. The sampling method used was purposive sampling method with 29 informants sampled. This type of research uses quantitative and qualitative approaches. In data analysis, the method used is a combined method of quantitative and qualitative data analysis, namely semi-structured interviews (questionnaires) and tested with a Likert scale. The results of the analysis show that the level of institutional effectiveness in KPHP Tebo Timur Unit X is in the fairly effective category. The driving factors in KPHP management are the high motivation of the community towards social forestry, easy accessibility, support from related agencies and the existence of references in forest management plans.*

**Keywords:** *KPH, effectiveness, institutional, driving factors, prevention factors.*

### **ABSTRAK**

*KPH adalah organisasi yang berkerja di tingkat tapak dan diharapkan menjadi prasyarat dari terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas kelembagaan dan mengetahui faktor-faktor pendorong serta penghambat dalam pengelolaan KPHP Tebo Timur Unit X. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode Purposive Sampling dengan 29 informan yang dijadikan sampel. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam analisis data metode yang digunakan yaitu metode gabungan antara analisis data kuantitatif dan kualitatif yaitu dengan wawancara semi terstruktur (kuesioner) dan diuji dengan skala likert. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kelembagaan di KPHP Tebo Timur Unit X tergolong dalam kategori cukup efektif. Adapun faktor pendorong dalam pengelolaan KPHP adalah motivasi yang tinggi dari masyarakat terhadap perhutanan sosial, kemudahan aksesibilitas, adanya dukungan dari instansi terkait dan adanya acuan dalam rencana pengelolaan hutan.*

**Kata kunci:** *KPH, efektivitas, kelembagaan, faktor pendorong, faktor penghambat*

*Diterima, 20 Mei 2023*

Disetujui, 20 Juni 2023

Online, 30 Juni 2023

---

## **PENDAHULUAN**

Keadaan hutan di Indonesia saat ini merupakan cermin tata kelola hutan yang kurang baik karena kondisi hutan semakin menurun dan luas tutupannya berkurang. Penyebab dari pengurangan luas hutan seperti pengelolaan hutan yang tidak lestari, penebangan liar, perambahan, konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan sektor lain, pencurian kayu, pertambangan dan kebakaran hutan serta okupasi lahan. Selain itu, tidak adanya organisasi pengelola di tingkat tapak menjadikan pengelolaan hutan belum efektif. Oleh karena itu, untuk memperkuat kelembagaan dan implementasi tata kelola pada tingkat tapak maka dibentuklah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai mandat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2018).

Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah organisasi yang berkerja di tingkat tapak dan diharapkan menjadi prasyarat dari terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan (Suwarno *et.al.*, 2014). Salah satu KPH yang ada di Provinsi Jambi adalah KPHP Tebo Timur Unit X. KPH ini ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.77/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010. Adapun yang menjadi isu strategis bagi KPHP Tebo Timur Unit X adalah kemiskinan di sekitar wilayah KPHP, *illegal logging*, kebakaran hutan, perambahan hutan untuk perkebunan dan pemukiman, berkurangnya tutupan lahan, belum optimalnya pemanfaatan hutan, belum optimalnya PNPB hasil hutan, masih lemahnya pengelola kawasan, belum seluruh wilayah KPHP Tebo Timur Unit X tertata kedalam blok dan petak serta masih banyaknya batas luar kawasan hutan dalam keadaan rusak bahkan sebagian besar hilang. Kawasan hutan KPHP Tebo Timur Unit X merupakan areal eks-HPH (RPHJP KPHP Tebo Timur Unit X, 2018).

Kondisi awal saat rancang bangun KPH di Provinsi Jambi diketahui bahwa di dalam kawasan hutan KPHP Tebo Timur Unit X sebagian kecil terindikasi terdapat okupasi berupa tanaman kelapa sawit dan karet. Kecenderungan ini menjadikan hasil pengelolaan sumber daya alam lingkungan semakin rusak terutama untuk kawasan hutan (RPHJP KPHP Tebo Timur Unit X, 2018). Berdasarkan uraian data tersebut dapat dikatakan untuk Kabupaten Tebo secara umum pengelolaan sumber daya alamnya masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun serta ketersediaan sumber daya alamnya menipis. Oleh karena itu, untuk tetap mempertahankan kelestarian dalam pengelolaan hutan faktor utama keberhasilannya dapat dilihat dari berfungsinya kelembagaan.

Berdasarkan penelitian Kartodihardjo *et al.* (2010) menunjukkan bahwa dengan adanya *stakeholder* dapat mempengaruhi efektivitas kinerja dari suatu lembaga.

Efektivitas hubungan antar *stakeholder* dalam pemenuhan kriteria dan indikator dalam pembentukan wilayah KPH sebagai wadah untuk pengelolaan hutan lestari. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari KPH dapat dianalisis berdasarkan 6 parameter yang telah ditetapkan oleh peneliti. Selain itu dengan adanya efektivitas kelembagaan dapat diketahui apakah kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan sudah berfungsi secara efektif atau belum dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong serta penghambatnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay, Desa Teluk Pandak Kecamatan Tebo Tengah dan Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir. Penentuan Desa-desanya dan informan dilakukan secara sengaja (*Purposive Sampling*). Penelitian ini dilaksanakan ± 2 bulan dimulai pada bulan September sampai dengan November 2020.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data yang diambil adalah tingkat efektivitas kelembagaan dan faktor-faktor pendorong serta penghambat dalam pengelolaan KPHP Tebo Timur Unit X. Metode pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur, observasi dan studi literatur. Informan yang dijadikan sampel berjumlah 29 informan dari perwakilan pengelola BPHP, pengelola BPDAS, karyawan ABT, pengelola KPHP, akademisi, aparatur desa dan masyarakat kelompok tani hutan. Dalam analisis data metode yang digunakan yaitu metode gabungan antara analisis data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berdasarkan hasil dari pengisian kuesioner ditanya pada informan yang dijadikan sampel dan diuji dengan metode skala likert. Untuk data kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan mendeskripsikannya untuk memperkuat hasil dari data kuantitatif.

Analisis data ini dilakukan dengan cara responden memberikan penilaian terhadap masing-masing pernyataan yang telah diberikan oleh peneliti. Berdasarkan penilaian tersebut akan diberi skor mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian skor tersebut dijumlahkan per masing-masing poin pernyataan, sehingga nantinya akan diketahui tingkat efektivitas kelembagaan yang berada di KPHP Tebo Timur Unit X. Adapun skala tingkat efektivitas kelembagaan KPHP dapat dilihat pada Penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah skor jawaban yang diperoleh dengan nilai skor tertinggi kemudian dikalikan dengan 100% maka akan dihasilkan persentase yang diharapkan (Sugiyono, 2017).

$$\text{persentase skor} = \frac{\text{jumlah skor yang didapat}}{\text{jumlah skor tertinggi}} \times 100\%$$

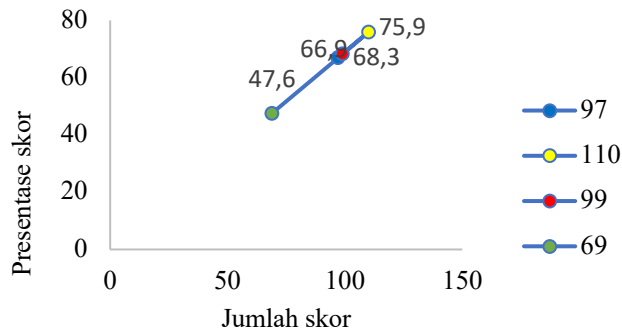
Dalam penelitian ini validitas atau keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber data berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Langkah-langkah dalam triangulasi sumber yang dilakukan meliputi membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN.

### Tingkat Efektivitas Kelembagaan KPHP Tebo Timur Unit X

Untuk mengetahui lembaga tersebut dapat mewujudkan tujuannya atau tidak maka dapat dilihat dari tingkat efektivitas. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Dalam menentukan tingkat efektivitas terdapat 6 (enam) parameter untuk mengetahuinya, yaitu:

#### 1. Inventarisasi Penataan Hutan

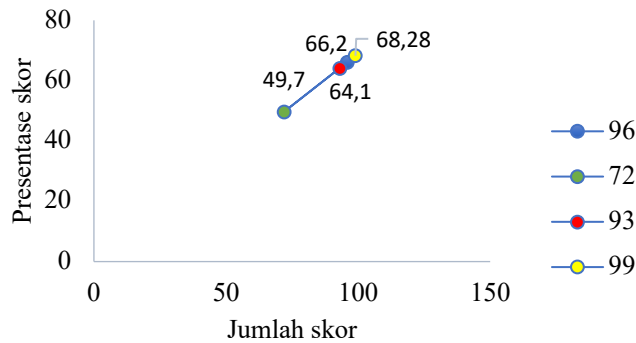


Gambar 1. Inventarisasi Penataan Hutan

Berdasarkan gambar 1, diketahui bahwa presentase skor paling rendah adalah 69 pada indikator hijau 47,6%. Skor tersebut rendah dikarenakan pada saat penelitian dan pengambiln data masyarakat banyak yang belum mengetahui dan memahami kegiatan ini. Selain itu, inventarisasi tata batas tidak dilakukan secara rutin melainkan dilakukan kegiatan tersebut apabila terjadi gangguan. Menurut RPHJP KPHP Tebo Timur Unit X kegiatan inventarisasi dilakukan secara berkala diwilayah kelola KPHP untuk mengetahui dengan tepat perubahan yang terjadi di wilayah KPHP selama kurun waktu tertentu. Kegiatan berkala ini ditujukan untuk dapat mengakomodir dinamika perubahan yang terjadi pada kondisi biogeofisik dan sosial ekonomi dan budaya pada setiap blok pengelolaan hutan di wilayah KPHP Tebo Timur Unit X. Pada tahun 2019-2020 tidak melakukan inventarisasi terhadap hasil hutan kayu sehingga inventarisasi difokuskan pada hasil hutan bukan kayu. Sedangkan skor tertinggi terdapat pada indikator kuning dengan jumlah skor 110 sehingga presentasenya 75,9%. KPHP sudah memiliki peta deskriptif yang jelas berdasarkan hasil telaah terdapat peta kawasan hutan Provinsi

Jambi (lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 863/Menhut-II/2014) dan interpretasi citra satelit tahun 2015 terhadap posisi sungai manggatal yang merupakan batas antara KPHP Unit X dengan KPHP Unit IX, maka luas KPHP Unit X berubah menjadi 105.246,55 hektar. KPHP telah memiliki SK penetapan wilayah yang disahkan oleh Menteri Kehutanan.

## 2. Pemanfaatan Hutan



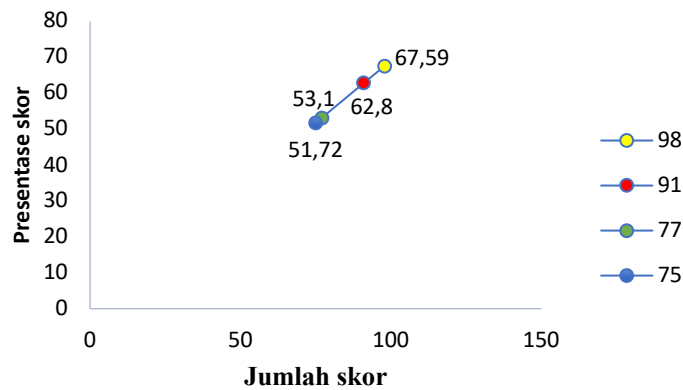
Gambar 2. Pemanfaatan Hutan

Berdasarkan gambar 2, diketahui bahwa presentase skor paling rendah pada indikator hijau yaitu 49,7% dengan jumlah skor 72. Hal ini terjadi karena pada saat penelitian dan pengambilan data, masyarakat banyak yang belum mengetahui dan memahami aturan yang telah ada. Selain itu, sebagian masyarakat masih melanggar aturan karena masyarakat tersebut tidak hadir ketika sosialisasi. Kegiatan sosialisasi tidak hanya disampaikan pada masyarakat tetapi juga melalui kepala desanya. Sebagian masyarakat sudah dapat mematuhi aturan dalam pemanfaatan hutan, rata-rata dari 6 kecamatan sebagian besar sudah dibebankan izin artinya sudah mendapatkan izin mengelola dan mau mematuhi aturan. Indikator kuning memperoleh jumlah skor 99 dengan presentase skor tertinggi yaitu 68,28%. Manfaat yang diperoleh masyarakat secara langsung adalah pengelola KPHP membantu membuat izin dalam mengelola kawasan hutan sekitar sehingga masyarakat memiliki legalitas dalam pengelolaan hutan. Sesuai dengan PP No 6 tahun 2007 pasal 70 ayat (1) setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.

## 3. Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Gambar 3, diketahui bahwa presentase skor paling rendah pada indikator biru yaitu 51,72% dengan jumlah skor 75. Skor tersebut rendah karena RPHJP baru dimulai pada tahun 2018. Sebagian program telah dijalankan sesuai dengan RPHJP dan sebagiannya masih dalam proses. Program-program lainnya sudah direncanakan

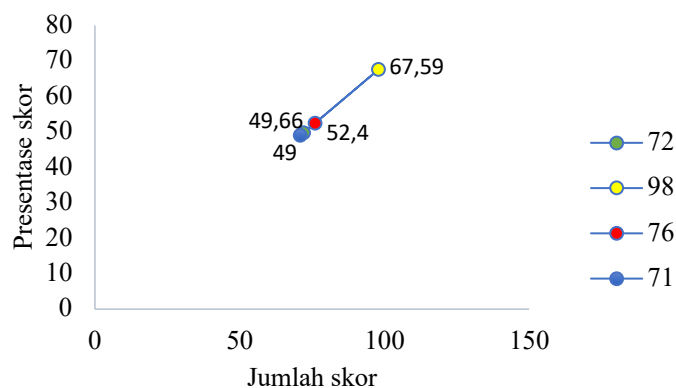
tetapi belum dapat direalisasikan karena terkendala oleh minimnya anggaran yang ada. Selain itu, program kegiatan belum berjalan secara optimal karena KPHP memiliki wilayah tertentu (wiltu) seluas 18.000 hektar yang diarahkan untuk kemitraan kehutanan diluar dari wilayah tertentu ada HTR dan HKM yang baru berjalan kegiatannya sekitar 5.000 hektar. Indikator kuning memperoleh presentase skor tertinggi yaitu 67,59% dengan jumlah skor 98.



**Gambar 3.** Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan yang telah dilakukan KPH di desa-desa sekitar yaitu melakukan penyuluhan ke masyarakat dan membantu membentuk KTH. Sebagian besar masyarakat ikut dalam kegiatan sosialisasi sehingga masyarakat tersebut mulai memahami dan mengetahui mengenai kegiatan KPH. Sebagian masyarakat yang ada di wilayah KPHP belum ikut bergabung karena masyarakat belum memahami secara rinci kegiatan ini dan tugasnya masing-masing sehingga indikator hijau memperoleh presentase skor 53,11% dengan jumlah skor 77.

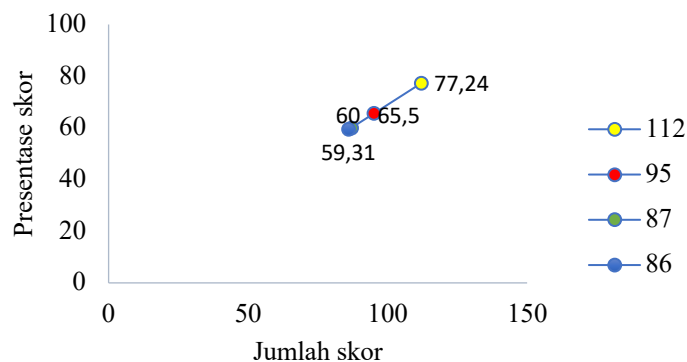
**4. Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi, Reklamasi serta Perlindungan hutan dan Konservasi Alam**



**Gambar 4.** Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi, Reklamasi serta Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Berdasarkan Gambar 4, diketahui bahwa presentase skor paling rendah pada indikator hijau yaitu 49% dengan jumlah skor 71. Menurut Kepala Seksi BKSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat kegiatan rehabilitasi sudah mulai dijalankan. Kegiatan tersebut dilakukan di daerah Teluk Pandak dengan lahan seluas 5 (lima) hektar yang sudah ditanami. Setelah melakukan kegiatan rehabilitasi dilakukan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi. Kegiatan tersebut dilakukan minimal 3 (tiga) kali dalam setahun. Akan tetapi pemantauan nyatanya tidak rutin dilakukan karena menyesuaikan dengan anggaran yang ada untuk kegiatan tersebut. Indikator kuning memperoleh presentase skor tertinggi yaitu 67,59% dengan jumlah skor 98. Presentase skor tersebut tinggi karena KPHP melibatkan masyarakat untuk membentuk kelompok tani hutan dengan cara memberi pelatihan dan pengetahuan menjadikan masyarakat mengetahui dan mengerti perlindungan atau konservasi. Indikator biru memperoleh presentase skor 49,66% karena sebagian masyarakat masih sulit memahami dan membedakan kegiatan rehabilitasi, reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Penyebab lainnya adalah masyarakat yang belum memahami bahwa lahan yang mereka miliki adalah milik negara, sedangkan menurut masyarakat lahan tersebut adalah milik nenek moyangnya sehingga masih sulit bagi masyarakat tersebut menyerahkan lahan yang di kuasai untuk direhabilitasi.

##### 5. Pengakuan Hak Mengelola dan Mekanisme Penyelesaian Konflik

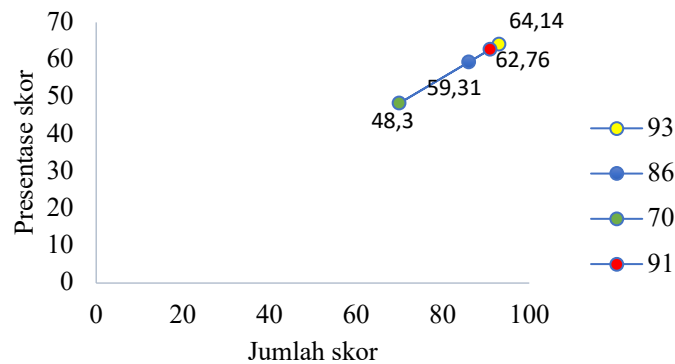


Gambar 5. Pengakuan Hak Mengelola dan Mekanisme Penyelesaian Konflik

Berdasarkan Gambar 5, diketahui bahwa presentase skor paling rendah pada indikator yaitu 59,31%. Skor tersebut rendah dibandingkan dengan skor yang lain dikarenakan pada saat dilakukan pengambilan data masyarakat menyatakan bahwa jarang terjadi konflik antar masyarakat. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa jika terjadi konflik biasanya pengelola KPHP membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pemicu terjadinya konflik diantaranya tumpah tindih lahan serta dalam kegiatan perhutanan sosial masih banyak terjadi konflik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Amalia (2019) yang menyatakan bahwa di KPHP belum ada atau jarang terjadi konflik akan tetapi potensi akan terjadinya konflik sangat banyak seperti adanya

pengakuan sepihak, adanya kebun masyarakat yang terlanjur dalam kawasan KPHP, penambangan batu bara, adanya aktivitas lain seperti *illegal logging* dan sebagainya. KPHP telah memiliki SK penetapan wilayah yang jelas dari Menteri SK Menri Kehutanan Nomor 47 48/MenLHK-KPHP/BKPHP/HPL. Oleh karena itu, indikator kuning memperoleh presentase skor tertinggi yaitu 77,24%. KPHP Tebo Timur Unit X merupakan salah satu KPHP yang wilayahnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.77/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Jambi dengan luas wilayah KPHP Tebo Timur Unit X adalah ±106.456 (seratus enam ribu empat ratus lima puluh enam) hektar.

## 6. Pengawasan dan Sanksi Pelanggaran Aturan



Gambar 6. Pengawasan dan Sanksi Pelanggaran Aturan

Berdasarkan Gambar 6, diketahui bahwa presentase skor paling rendah pada indikator hijau yaitu 48,3%. Skor tersebut rendah dibandingkan dengan presentase skor yang lain karena kegiatan tersebut dilakukan tidak tepat waktu dan tidak terjadwal. Patroli dilakukan tidak tepat waktu dan dilakukan tidak disemua wilayah tetapi hanya wilayah tertentu saja karena menyesuaikan dengan anggaran yang ada, apabila anggaran cukup maka dalam satu bulan sekali dapat dilakukan dua kali patroli. Pengelolaan yang dilakukan selama ini sebagian besar masih dalam proses, karena terdapat perubahan struktur organisasi dari kedinasan ke dalam bentuk KPHP. Pada indikator kuning memperoleh presentase skor tertinggi yaitu 64,14%. Skor tersebut diperoleh karena rata-rata masyarakat yang tinggal disekitar hutan sudah mengetahui bahwa KPHP merupakan perpanjangan tangan dari dinas kehutanan dan mengerti sanksi apa yang akan diberikan apabila melanggar aturan tersebut. Indikator merah memperoleh presentase skor 62,76%. Menurut informasi dari informan menyebutkan bahwa masih maraknya *illegal logging* disebabkan karena keterbatasan personil dari polisi hutan yang sedikit, sedangkan kawasan hutannya luas sehingga sulit untuk terjangkau serta sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung. Berikut merupakan presentase skor dari



keenam parameter berdasarkan kategori tingkat efektivitasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Persentase skor tingkat efektivitas kelembagaan KPHP Tebo Timur

No	Kriteria Penilaian	Presentase Skor (%)	Tingkat Efektivitas
1.	Inventarisasi penataan hutan	64,66	Cukup Efektif
2.	Pemanfaatan hutan	62,07	Cukup Efektif
3.	Pemberdayaan masyarakat	58,79	Cukup Efektif
4.	Pengawasan dan sanksi pelanggaran aturan	58,62	Cukup Efektif
5.	Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi, reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam	54,66	Cukup Efektif
6.	Pengakuan hak mengelola dan mekanisme penyelesaian konflik	65,52	Cukup Efektif

*Sumber: pengolahan data primer, 2020*

Berdasarkan analisis efektivitas kelembagaan yang telah dilakukan di KPHP Tebo Timur Unit X dengan 6 parameter yang telah ditetapkan dan dengan 29 informan, maka diperoleh hasil bahwa efektivitas kelembagaan di KPHP Tebo Timur Unit X tergolong dalam kategori cukup efektif. Hasil perhitungan dari skala likert menunjukkan rata-rata presentase skor yaitu 60,72%. Dari perhitungan tersebut maka KPHP Tebo Timur perlu untuk meningkatkan pengelolaan hutannya kembali dan kendala-kendala yang ada dapat teratasi untuk pengelolaan kedepannya.

## **FAKTOR PENDORONG DAN PENGAMBAT EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN**

### **1. Faktor Pendorong**

Faktor pendorong merupakan faktor yang menjadikan pengelolaan KPHP Tebo Timur menjadi lebih baik dan maju. Adapun faktor pendorong dari tingkat efektivitas kelembagaan KPHP Tebo Timur yang pertama adalah adanya motivasi yang tinggi dari masyarakat terhadap perhutanan sosial karena mereka merasa mendapatkan manfaat secara langsung dari kegiatan KPH. Manfaat yang dimaksud adalah masyarakat yang telah gabung dalam kegiatan perhutanan sosial mendapatkan izin mengelola hutan dengan bantuan dan didampingi KPH. Faktor kedua adalah kemudahan aksesibilitas yaitu wilayah KPHP yang ada tidak terlalu jauh sehingga mudah dalam pengawasan. Terdapat dua jalur untuk sampai di kantor wilayah KPHP Tebo Timur Unit X pertama rute Jambi-Tebo dan kedua rute Bungo-Tebo. Faktor ketiga adalah adanya dukungan dari instansi terkait seperti UPT, NGO, atau LSM, BPKH wilayah XIII Pangkal pinang yang mendukung kegiatan dari KPHP serta memberi bantuan berupa fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Faktor keempat adalah adanya acuan dalam rencana pengelolaan hutan. Dalam melakukan tugas dan fungsinya KPH memiliki acuan yang digunakan untuk mengelola hutan. Acuan tersebut merupakan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang telah disahkan dan dijalankan programnya dari tahun 2018.

## **2. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat merupakan faktor yang menjadikan program-program yang telah direncanakan tidak dapat terealisasi karena terkendala beberapa hal. Faktor penghambat pertama adalah terbatasnya anggaran dana sehingga menyebabkan rencana kerja masih belum optimal dilakukan dan sebagian rencana kerjanya ada yang belum terlaksana. Selama terjadinya pandemi covid-19 banyak kegiatan yang terkendala bahkan dihapus karena anggaran yang dikurangi akibat covid-19. Kedua adalah terbatasnya sumber daya manusia yang belum memadai dalam mengelola hutan yang ada di wilayah KPHP Tebo Timur Unit X. Kurangnya SDM berdasarkan fungsi dan keahlian tersebut mengakibatkan banyak program-program yang telah direncanakan menjadi terkendala. Jumlah personil KPHP yang dibutuhkan minimal kurang lebih sebanyak 40 personil baru terpenuhi sebanyak 17 personil, sedangkan kawasan hutannya luas sehingga sulit untuk terjangkau. Ketiga sarana dan prasarana yang kurang memadai menurut Djaenudin *dalam* buku Hernowo dan Ekawati (2014) dalam kegiatan pengelolaan, sarana dan prasarana berfungsi untuk menunjang kelancaran kegiatan. Keempat perubahan cara berpikir pengelola KPHP biasanya disebut dengan ASN/PNS. Cara ASN bekerja dibatasi oleh aturan sehingga mereka tidak dapat berpikir diluar dari aturan yang telah ditetapkan.

## **KESIMPULAN**

Efektivitas kelembagaan di KPHP dinilai dengan 6 (enam) parameter dan diukur dengan skala likert. Untuk presentase skor tertinggi pada parameter pengakuan hak mengelola dan mekanisme penyelesaian konflik yaitu 65,51%. Parameter inventarisasi penataan hutan dengan presentase 62,67%, untuk parameter pemanfaatan hutan yaitu 62,07%. Selanjutnya parameter pemberdayaan masyarakat yaitu 58,80%, untuk parameter pengawasan dan sanksi pelanggaran aturan yaitu 58,22%. Presentase terendah pada parameter pembinaan dan pemantauan kegiatan rehabilitasi, reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam yaitu 54,66%. Hasil rata-rata dari ke enam parameter tersebut adalah 60,12% sehingga masuk dalam kriteria penilaian cukup efektif. Faktor pendorong dari pengelolaan KPHP adalah motivasi yang tinggi dari masyarakat terhadap perhutanan sosial, kemudahan aksesibilitas, adanya dukungan dari instansi terkait, adanya acuan dalam rencana pengelolaan hutan. Sedangkan faktor penghambat dari pengelolaan KPHP adalah terbatasnya anggaran dana, terbatasnya SDM, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan perubahan cara berpikir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, F. 2019. Analisis efektivitas kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bungo Unit II. *Skripsi*. Universitas Jambi, Jambi, Indonesia.
- Hernowo B & Ekawati S. 2014. *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian*. PT Kanisius, Yogyakarta, Indonesia.
- Kartodihardjo H, and Suwarno E. 2014. *Pengarusutamaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Kehutanan*. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2018. *Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2018*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Peraturan Gubernur Jambi. 2017. *Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Penetapan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi*. Jambi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan*. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 4696. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2002. *Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan*. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 4206. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 167. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- UPTD KPHP Tebo Timur Unit X. 2018. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Tebo Timur Unit X*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian dan Pengembangan research and development*. Alfabeta, Bandung, Indonesia.
- Suwarno E. 2015. Apakah KPH dapat memperbaiki tata kelola hutan Indonesia?. *Jurnal Kehutanan*. 10:(2).